































e-Filing

No.	Nama PN / WL	Tanggal Laport	Jenis Pelaporan	Jabatan	Status Laporan	Laporan Via	Aksi
1	JOHN KENEDY AZIS	31/12/2025	Khusus, Awal Menjabat	• BUPATI (R)	Proses Verifikasi Surat Kuasa: Sudah Diterima	Online	    
2	JOHN KENEDY AZIS	31/12/2023	Periodik	• ANGGOTA DPR RI (R)	Diumumkan Lengkap Surat Kuasa: Sudah Diterima	Online	    
3	JOHN KENEDY AZIS	31/12/2022	Periodik	• ANGGOTA DPR RI (R)	Diumumkan Surat Kuasa: Sudah Diterima	Online	    
4	JOHN KENEDY AZIS	31/12/2021	Periodik	• ANGGOTA DPR RI (R)	Diumumkan Surat Kuasa: Sudah Diterima	Online	    
5	JOHN KENEDY AZIS	31/12/2020	Periodik	• ANGGOTA DPR RI (R)	Diumumkan Surat Kuasa: Sudah Diterima	Online	    
6	JOHN KENEDY AZIS	31/12/2019	Periodik	• ANGGOTA DPR RI (R)	Diumumkan Surat Kuasa: Sudah Diterima	Online	    



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RAHMAT HIDAYAT
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 964845

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 9.885.550.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/110 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HULU, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah Seluas 188 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HULU, HASIL SENDIRI Rp. 56.400.000
3. Tanah Seluas 259 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HULU, HASIL SENDIRI Rp. 90.650.000
4. Tanah Seluas 260 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HULU, HASIL SENDIRI Rp. 91.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1.500 m2/1.967 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HULU, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000.000
6. Tanah Seluas 675 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HULU, HASIL SENDIRI Rp. 540.000.000
7. Tanah Seluas 715 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HULU, HASIL SENDIRI Rp. 357.500.000
8. Tanah Seluas 5.362 m2 di KAB / KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 592.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000



2. MOTOR, KAWASAKI KLX Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.  
15.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.  
7.000.000
4. MOBIL, HYUNDAI MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.  
170.000.000

<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	<b>341.600.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	<b>407.746.135</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	Rp.	<b>11.226.896.135</b>
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	---
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	<b>11.226.896.135</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HENDRA ASWARA
2. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
3. NHK : 681574

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>300.000.000</b>
1. Tanah Seluas 177 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>250.000.000</b>
1. MOBIL, HONDA HRV MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>30.000.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>580.000.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>70.000.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>510.000.000</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.